

**DESKRIPSI KECAMATAN KEDAMAIAN SEBAGAI HASIL
PEMEKARAN WILAYAH DARI KECAMATAN TANJUNGPUR
TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018**

(Skripsi)

Oleh

Noris Subhan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

DESKRIPSI KECAMATAN KEDAMAIAAN SEBAGAI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DARI KECAMATAN TANJUNGPUR TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018

Oleh

NORIS SUBHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pemekaran wilayah Kecamatan Kedamaian. Titik tekan kajian ini setelah pemekaran wilayah dengan pendeskripsian tentang (1) Keadaan jumlah penduduk (2) luas wilayah (3) Keadaan ekonomi (4) Sarana dan Prasarana kecamatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, Objek penelitiannya jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan ekonomi, dan sarana Kecamatan Kedamaian., Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemekaran Kecamatan Kedamaian (1) luas wilayah tidak memenuhi syarat pembentukan kecamatan baru (2) jumlah penduduk kecamatan Kedamaian telah memenuhi syarat pembentukan kecamatan baru (3) keadaan ekonomi Kecamatan Kedamaian di tunjang dengan sarana yang baik (4) keadaan sarana Kecamatan Kedamaian sudah cukup baik.

Kata Kunci : Deskripsi, Pemekaran, Kedamaian

ABSTRACT

DESCRIPTION OF KEDAMAIAAN SUBDISTRICT AS A RESULT EXPANSION FROM TANJUNGPURUSUBDISTRICT BANDAR LAMPUNG CITY 2018

By

NORIS SUBHAN

This research aims to examine the expansion of Kedamaian Subdistrict. The research focuses on the expansion area with the description (1) the large area (2) the number of inhabitants (3) Economic condition (4) Subdistrict facilities and infrastructure. The method used in this research is descriptive method, the object research number of inhabitants, area, economic condition, facilities and infrastructure Kedamaian subdistrict Data collection used observation method, unstructured interview, and documentation. Analysis data using percentage This research indicates in the Kecamatan Kedamaian (1) the area didn't qualification of the new subdistrict (2) the population of Kecamatan Kedamaian has qualification the requirement of the new kecamatan (3) the economic condition of Kecamatan Kedamaian with good facilities (4) the means of Kecamatan Kedamaian is good enough.

Keywords : description, expansion, kedamaian

**DESKRIPSI KECAMATAN KEDAMAIAN SEBAGAI HASIL
PEMEKARAN WILAYAH DARI KECAMATAN TANJUNGKARANG
TIMUR KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018**

**Oleh
Noris Subhan**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi pendidikan Geografi
Jurusan Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **DESKRIPSI KECAMATAN KEDAMAIAN
SEBAGAI HASIL PEMEKARAN WILAYAH DARI
KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2018**

Nama Mahasiswa : **Noris Subhan**

Nomor pokok Mahasiswa : 1013034060

Program Studi : Pendidikan Geografi

Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.
NIP 19570725 198503 1 001



Drs. Edy Haryono, M.Si.
NIP 19571218 198603 1 002

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi
Pendidikan Geografi


Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001


Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.
NIP 19570725 198503 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

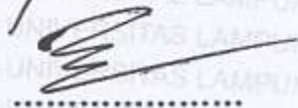
Ketua : Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si.



Sekretaris : Drs. Edy Haryono, M.Si.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Sugeng Widodo, M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Dr. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 April 2018

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noris Subhan
NPM : 1013034060
Program Studi : Pendidikan Geografi
Jurusan : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ Deskripsi Kecamatan Kedamaian Sebagai Hasil Pemekaran Wilayah Dari Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2018” tersebut adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan penulis buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terjadi kesalahan, penulis bersedia menerima sanksi akademik sebagaimana yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, April 2018

Penulis



Noris Subhan
NPM 1013034060

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Panjang, pada tanggal 19 maret 1991. Penulis Merupakan Putra ke dua dari empat bersaudara, buah hati pasangan Bapak Suderajat dan Ibu Robiyah. Penulis memulai pendidikannya di SDN 1 Panjang Utara pada tahun 1997 dan selesai pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4 Bandar Lampung Selanjutnya, pada tahun yang sama Penulis melanjutkan sekolah di SMA Negeri 4 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2009.

Pada tahun 2010, penulis diterima sebagai mahasiswa Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur Seleksi National Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Pada tahun 2013 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan 1 Geografi di Pesawaran. Pada tahun 2014 melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan 2 Geografi di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bandung. Pada tahun yang sama penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sukau Lampung Barat yang bersinergi dengan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Sukau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat pada bulan Juli sampai September 2014.

MOTTO

Maka Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (QS Al-Insyirah 5-7)

(Noris Subhan)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada
Ayahanda, Ibunda dan Istri Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya telah memudahkan dan menerangi jalan pikiran penulis dalam menyusun skripsi yang berjudul “Deskripsi Kecamatan Kedamaian Sebagai Hasil Pemekaran Wilayah Dari Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2018”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan.

Penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, semangat, bimbingan dan do'a dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung terimakasih atas izin yang telah diberikan sehingga penulis dapat memperoleh ilmu di Fakultas ini.
2. Bapak Dr. Abdurahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Hi. Buchory Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial terimakasih atas izin dan pelayanan administrasi yang telah diberikan.
6. Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi dan sebagai pembimbing 1 terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
7. Bapak Drs. Edy Haryono, M.Si., sebagai pembimbing 2 terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan.
8. Bapak Dr. Sugeng Widodo, M.Pd., sebagai penguji utama terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan
9. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Suderajat dan almarhumah Ibu Robiyah yang selalu mendoakan dan memotivasiku serta menantikan keberhasilanku.
10. Istriku Rosema Nurlita serta keluarga besar yang selalu menjadi penyemangatku dalam meraih impian dan cita-cita.
11. Sahabat-sahabatku di program studi S1 Pendidikan Geografi angkatan 2010 Universitas Lampung terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan kita.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, April 2018
Penulis,

Noris Subhan
NPM 1013034060

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR	
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Pengertian Geografi	12
2. Pengertian Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah	12
3. Desentralisasi	14
4. Kecamatan.....	15
5. Kriteria Pemekaran Kecamatan.....	18
B. Kerangka Pikir.....	23
III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	24
B. Subjek Penelitian	25
C. Objek penelitian.....	25
D. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel	
1. Variabel Penelitian	26
2. Definisi Operasional Variabel	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisa Data.....	28

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	30
1. Keadaan Geografis Wilayah Kecamatan Kedamaian.....	30
a. Letak.....	30
b. Luas	31
c. Kondisi Demografi.....	31
1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	31
2. Komposisi Penduduk Kecamatan Kedamaian	34
a. Komposisi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
b. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	36
c. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan	37
2. Hasil dan Pembahasan	38
1. Identitas Responden.....	39
2. Luas Wilayah	40
3. Keadaan Penduduk Kecamatan Kedamaian	43
4. Keadaan Ekonomi Penduduk Kecamatan Kedamaian..	47
5. Sarana dan Prasarana Kecamatan Kedamaian	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Luas Kecamatan Kota Bandar Lampung Sebelum Pemekaran Tahun 2018.....	5
2. Luas Kecamatan Kota Bandar Lampung Sesudah Pemekaran Tahun 2018	6
3. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Kedamaian Tahun 2018	33
4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	34
5. Jumlah Penduduk Kecamatan Kedamaian Berdasarkan Jenis Kelamin	36
6. Penduduk Kecamatan Kedamaian Berdasarkan Pekerjaan Tahun 2018.....	37
7. Identitas Responden	39
8. Luas Wilayah Kecamatan Tanjungkarang Timur Sebelum Pemekaran	40
9. Persepsi Informan Terhadap Luas Wilayah Kecamatan Tanjungkarang Timur Sebelum Pemekaran	41
10. Luas Wilayah Kecamatan Kedamaian	43
11. Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjungkarang Timur Sebelum Pemekaran Kecamatan Kedamaian	45
12. Persepsi Informan Terhadap Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjungkarang Timur Sebelum Pemekaran.....	46
13. Jumlah Penduduk Kecamatan Kedamaian tahun 2018	47
14. Sarana Perekonomian Kecamatan Kedamaian Tahun 2018.....	48
15. Peningkatan Sarana Perekonomian Yang Diinginkan Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung	49
16. Hasil Penilaian Sarana Kecamatan Kedamaian.....	51
17. Jumlah Sekolah di Kecamatan Kedamaian	53

18.	Sarana Kesehatan Kecamatan Kedamaian	54
19.	Jumlah Tenaga Medis Kecamatan Kedamaian	55
20.	Sarana Ibadah Kecamatan Kedamaian	56
21.	Jumlah Lapangan Olahraga di Kecamatan Kedamaian.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	23
2. Peta Administrasi Kecamatan Kedamaian Tahun 2018.....	42

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan realisasi dari suatu perencanaan yang dapat diterapkan terhadap daerah-daerah yang masih kosong dan terhadap daerah-daerah yang sudah di diami penduduk. Salah satu pembangunan yang menjadi bagian integral dari pembangunan nasional adalah pembangunan daerah yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip otonomi daerah, dan diwujudkan dengan memberi kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan pembangunan serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Salah satu aspek yang sangat penting dari pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah pemekaran dan penggabungan wilayah. Dimana pemekaran wilayah ini bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat lokal dalam rangka pertumbuhan kehidupan demokrasi (PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008). Dengan interaksi yang lebih intensif antara masyarakat dan pemerintah daerah baru, maka masyarakat sipil akan memperoleh hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara lebih baik sebagai warga negara.

Upaya pemekaran wilayah ini merupakan tindakan pengadaan wilayah baru berdasarkan pada wilayah yang sudah ada. Pada dasarnya pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah yang perlu diperhatikan, karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah serta pengembangan wilayah di Indonesia. Dalam otonomi daerah Pemekaran wilayah bisa terjadi di tingkat propinsi, kecamatan bahkan di tingkat desa sekalipun. Dalam pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban (Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2000).

Pelaksana otonomi daerah pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam mengatur daerahnya. Kewenangan pemerintah daerah meliputi perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenagakerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan (UU No. 32 tahun 2004).

Pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pemerintah kabupaten kota harus dilaksanakan dengan perencanaan yang baik. Hal tersebut didasarkan mengingat pentingnya perencanaan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pembangunan wilayah. Pemerintah harus menyelenggarakan pembangunan daerahnya dengan sebaik mungkin, supaya tidak terjadi kesalahan dalam proses pelaksanaan pembangunan wilayah. Hal itu sesuai dengan pengertian perencanaan, yang menjelaskan bahwa perencanaan dapat dibagi atas dua versi, yaitu:

“versi melihat perencanaan adalah suatu teknik atau profesi yang membutuhkan keahlian dan versi yang satu lagi melihat perencanaan (pembangunan) adalah kegiatan kolektif yang harus melibatkan seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Robinson Tarigan, 2010: 5)”

Perencanaan ruang wilayah sendiri adalah perencanaan penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah yang intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (*land use planning*) dan perencanaan pergerakan pada ruang tersebut (Robinson Tarigan, 2010: 49). Untuk mewujudkan perencanaan wilayah yang baik dibutuhkan sebuah konsep perencanaan tata ruang wilayah. Konsep tersebut akan mengatur dan merencanakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan suatu wilayah.

Pemekaran wilayah yang terjadi tidak terlepas dari Penataan wilayah itu sendiri dimana penataan wilayah merupakan hal yang umum dilakukan dalam manajemen pemerintahan daerah karena untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dalam otonomi daerah juga harus memperhatikan aspek-aspek perencanaan

wilayah. Salah satunya harus memperhatikan aspek geografi baik dalam aspek fisik maupun aspek non fisik sehingga tujuan dari pembangunan dapat tercapai dan memberikan manfaat yang merata demi terciptanya kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah (Peraturan Daerah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008).

Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, terbuka kemungkinan untuk membentuk kecamatan baru. Pada masa UU Nomor 5 tahun 1975, pembentukan kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah melewati tahap persiapan dalam bentuk Perwakilan Kecamatan. Karena pembentukannya melalui PP, maka jumlah kecamatan dapat dikendalikan sesuai prinsip efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan Surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tentang pemekaran kelurahan di Kota Bandar Lampung secara administratif terdiri dari 13 kecamatan, 98 Kelurahan, 246 Lingkungan Serta 2627 RT.

Pada tahun 2012 melalui peraturan daerah kota Bandar Lampung No 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang sejumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang berjumlah 98 menjadi 126 kelurahan.

Tabel 1 Luas Kecamatan Kota Bandar Lampung Sebelum Pemekaran

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Teluk Betung Barat	20,99
2	Teluk Betung Selatan	10,07
3	Panjang	21,16
4	Tanjungkarang Timur	25,42
5	Teluk Betung Utara	10,38
6	Tanjungkarang Pusat	6,68
7	Tanjungkarang Barat	15,14
8	Kemiling	27,65
9	Kedaton	10,68
10	Rajabasa	13,02
11	Tanjung Seneng	11,63
12	Sukarame	16,87
13	Sukabumi	11,64
Jumlah		197,22

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2018

Pada tahun 2012 melalui peraturan daerah kota Bandar Lampung No 04 tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang sejumlah 13 kecamatan menjadi 20 kecamatan dan pemekaran kelurahan yang berjumlah 98 menjadi 126 kelurahan.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Setelah Pemekaran Kecamatan Kota Bandar Lampung

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Teluk Betung Barat	11.02
2	Teluk Betung Timur	14.83
3	Teluk Betung Selatan	3.79
4	Bumi waras	3.75
5	Panjang	15.75
6	Tanjung Karang Timur	2.03
7	Kedamaian	8.21
8	Teluk Betung Utara	4.33
9	Tanjung Karang Pusat	4.05
10	Enggal	3.49
11	Tanjung Karang Barat	14.99
12	Kemiling	24.24
13	Langkapura	6.12
14	Rajabasa	13.53
15	Tanjung Senang	10.63
16	Labuhan ratu	7.97
17	Sukarame	14.75
18	Suka Bumi	23.60
19	Way Halim	5.35
20	Kedaton	4.79
Jumlah		197.22

Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2018

Dilihat dari tabel 1.1 pemekaran kecamatan Bandar Lampung yang melakukan pemekaran meliputi kecamatan

1. Kecamatan Labuhan Ratu sebagai pemekaran Kecamatan kedaton
2. Kecamatan Wayhalim sebagai pemekaran Kecamatan Sukarame
3. Kecamatan Langkapura sebagai pemekaran Kecamatan Kemiling
4. Kecamatan Teluk Betung Timur sebagai pemekaran Kecamatan Teluk Betung Barat
5. Kecamatan Bumi Waras sebagai pemekaran Teluk Betung Selatan
6. Kecamatan Enggal sebagai pemekaran Kecamatan Tanjung Karang Pusat
7. Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran Kecamatan Tanjung Karang Timur

Secara resmi menurut Peraturan Pemerintah Daerah No 04 tahun 2012 tentang Penataan dan Pembentukan kelurahan dan Kecamatan, pemekaran wilayah administratif Kecamatan Kedamaian terbentuk pada tanggal 17 september 2012 sebagai pemekaran Kecamatan Tanjungkarang Timur, pemekaran wilayah administratif disini adalah dengan cara mengadakan pembagian wilayah kecamatan berdasarkan administratif pemerintahan, sehingga terbentuklah kecamatan baru di wilayah kecamatan yang sudah ada. kelurahan yang ada di Kecamatan Kedamaian di ambil dari sebagian wilayah Kecamatan Tanjungkarang Timur dan Kecamatan Sukabumi yang menghasilkan 7 kelurahan di Kecamatan Kedamaian, 3 kelurahan berasal dari Kecamatan Tanjungkarang Timur, 1 kelurahan berasal dari Kecamatan Sukabumi dan 3 kelurahan lainnya baru terbentuk, menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No 04 Tahun 2000 tentang kriteria luas wilayah pembentukan kecamatan baru minimal 10 km²,

Luas suatu wilayah merupakan hal yang penting dalam pemekaran wilayah, karena luas wilayah dibutuhkan untuk pembangunan pemukiman penduduk, pertanian dan sarana kepentingan umum seperti jalan, tempat ibadah, lapangan,

sekolah serta dibidang perkenomian seperti pasar dan pusat pertokoan. Wilayah kecamatan yang terlalu luas dapat menjadi suatu kendala dalam terlaksananya pembangunan yang merata.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mendeskripsikan hasil pemekaran wilayah administratif Kecamatan Kedamaian ditinjau dari Kriteria pembentukan kecamatan baru berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No 04 Tahun 2000 dengan judul Deskripsi Kecamatan Kedamaian Sebagai Hasil Pemekaran Wilayah Dari Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung Tahun 2018

B. Identifikasi Masalah

Apakah setelah pemekaran wilayah Kecamatan Kedamaian sebagai hasil pemekaran Kecamatan Tanjungkarang Timur sudah sesuai dengan ketentuan kriteria pembentukan kecamatan berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No 04 Tahun 2000 Kriteria teknis pemekaran kecamatan yang meliputi:

1. Luas wilayah
2. Jumlah penduduk
3. Bagaimana Keadaan ekonomi?
4. Ketersediaan sarana dan prasarana

C. BATASAN MASALAH

Dalam penelitian ini peneliti tidak membatasi analisa, identifikasi akan penulis lakukan sesuai dengan kriteria pemekaran Kecamatan Kedamaian.

D. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah maka penulis merumuskan masalah, apakah pemekaran wilayah administratif Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran wilayah Kecamatan Tanjungkarang Timur di kota Bandar Lampung memenuhi kriteria pembentukan?

Dengan indikator pertanyaan sebagai berikut :

1. Berapa luas wilayah Kecamatan Kedamaian sebagai hasil pemekaran wilayah dari Kecamatan Tanjungkarang Timur ?
2. Berapa jumlah penduduk Kecamatan Kedamaian sebagai hasil pemekaran wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur ?
3. Bagaimana Aktivitas perekonomian penduduk Kecamatan Kedamaian sebagai hasil pemekaran wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur?
4. Bagaimana Keadaan sarana dan prasarana Kecamatan Kedamaian sebagai hasil pemekaran wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan luas wilayah Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur ?
2. Untuk mendeskripsikan jumlah penduduk Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur?
3. Untuk mendeskripsikan aktivitas perekonomian Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur ?
4. Untuk mendeskripsikan sarana dan prasarana pembangunan Kecamatan Kedamaian sebagai pemekaran wilayah administratif Kecamatan Tanjungkarang Timur ?

F. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Program Studi Pendidikan Geografi jurusan Pendidikan IPS FKIP Universitas Lampung
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan meneliti masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Sebagai suplemen bahan ajar pendidikan geografi pada materi geografi pembangunan dan perencanaan wilayah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Objek dalam penelitian ini adalah kajian geografi yang menyangkut luas wilayah, jumlah penduduk, aktivitas perekonomian serta sarana dan prasarana pembangunan.
2. Subjek yang diteliti adalah instansi-instansi terkait dalam pemekaran wilayah Kecamatan Kedamaian antara lain: aparat Kecamatan Kedamaian, dan seluruh Lurah Kecamatan Kedamaian.
3. Ruang Lingkup Tempat penelitian adalah Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.
4. Ruang lingkup waktu adalah Tahun 2018
5. Ruang lingkup Ilmu adalah Ilmu Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah.

Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah adalah disiplin ilmu geografi yang membahas tentang konsep geografi pembangunan dan terapanya dalam pembangunan wilayah, pendekatan-pendekatan dalam pembangunan, regional dan regionalisasi, teori-teori konsep perencanaan wilayah, macam perencanaan pembangunan dan sektoral, tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah dan struktur tata ruang wilayah.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Geografi

Menurut Ikatan Geografi Indonesia atau IGI dalam Sumadi (2003: 4) bahwa Geografi adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelengkapan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Ilmu geografi terdiri atas 2 aspek yaitu aspek fisik dan aspek sosial, aspek fisik berkenaan dengan alam sekitar dan aspek sosial berkenaan dengan manusia. Kedua aspek tersebut saling berhubungan, dalam hal interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam penelitian ini lingkup ilmu yang digunakan yaitu Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah.

2. Pengertian Geografi Pembangunan dan Perencanaan Wilayah

Menurut pendapat Bintarto (1977: 7), Geografi Pembangunan adalah suatu studi yang memperhatikan aspek-aspek geografi yang menunjang suatu pembangunan wilayah. Adapun aspek-aspek geografi yang menunjang suatu pembangunan wilayah menurut Bintarto (1977: 7), berupa:

- a. Aspek fisik meliputi fisiografi, morfologi, hidrografi dan iklim
- b. Aspek manusia yang meliputi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, Kepadatan penduduk, dan pola pemukiman penduduk
- c. Aspek abstrak yang meliputi letak, luas, dan batas
- d. Aspek biotis seperti hewan dan tanaman

Dalam pembangunan suatu daerah Perencanaan wilayah merupakan hal yang utama dilakukan karena dengan adanya perencanaan wilayah kita dapat mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor noncontrollable yang relevan, memperkirakan factor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan (Robinson Tarigan,2005:3).

Pentingnya perencanaan wilayah ini dilandasi oleh beberapa faktor yaitu :

- a. Potensi wilayah terbatas,
- b. Kemampuan teknologi dan cepatnya perubahan dalam kehidupan manusia,
- c. Kesalahan perencanaan yang sudah dieksekusi di lapangan sering tidak dapat diubah atau diperbaiki kembali,
- d. Lahan dibutuhkan setiap manusia untuk menopang kehidupannya.
- e. Tatanan wilayah sekaligus menggambarkan kepribadian masyarakat dimana kedua hal tersebut saling mempengaruhi
- f. Potensi wilayah sebagai aset yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat secara lestari dan berkelanjutan. (Robinson Tarigan, 2005: 8)

Adapun pengertian perencanaan pembangunan wilayah menurut Affandi Anwar dan Setia Hadi (Riyadi, 2003: 8) mengemukakan pengertian perencanaan pembangunan wilayah, yaitu :

“suatu proses atau tahapan pengarahannya kegiatan pembangunan disuatu wilayah tertentu yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain, termasuk sumber daya alam dan lingkungan melalui investasi”

3. Desentralisasi

Salah satu asas Dalam pemekaran wilayah yang harus diperhatikan yaitu asas desentralisasi, dimana asas desentralisasi mempunyai pengertian penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu (Kansil, 2001: 3). Sedangkan di dalam UU No. 5 Tahun 1974 dijelaskan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya.

Dari pengertian di atas desentralisasi dapat diartikan sebagai pemberian kekuasaan kepada daerah otonom untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Tujuan dianutnya asas desentralisasi menurut The Liang Gie dalam Sikola (2005: 45) adalah :

- a. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani
- b. Desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian
- c. Desentralisasi dimaksudkan untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien
- d. Desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, watak dan kebudayaan, atau latar belakang sejarahnya
- e. Dengan desentralisasi pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan daerah.

4. Kecamatan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah (Peraturan Daerah Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Pasal 17 mengenai kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota.
- b. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pemekaran wilayah merupakan wujud implementasi otonomi daerah dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk membentuk suatu kabupaten/kota yang baru, yang terpisah dan tidak berhierarki dengan kabupaten induk, sedangkan wilayah kecamatan merupakan wilayah kerja perangkat daerah kabupaten dan daerah kota yang dipimpin oleh kepala kecamatan (Undang-Undang Otonomi Daerah No.32 Tahun 2004). Dalam hal ini, kabupaten merupakan daerah otonom yang terdiri dari beberapa kecamatan sebagai perangkat perwilayahan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan menjelaskan bahwa Pembentukan kecamatan merupakan pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, atau penyatuan wilayah desa, kelurahan dari beberapa kecamatan. Dalam pasal Pasal 3 disebutkan syarat pembentukan kecamatan sebagaimana harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun.
- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun.
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- d. Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.
- e. Rekomendasi Gubernur.

Persyaratan teknis dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator. Apabila ditelusuri lebih jauh, urgensi pembentukan daerah otonom tidak hanya ditentukan oleh persyaratan-persyaratan teknis seperti kemampuan ekonomi, karakteristik dan potensi daerah, jumlah penduduk, dan luas daerah, tetapi terdapat pula dimensi politik.

Menurut Maskun (2001: 13) tuntutan pemekaran wilayah sebenarnya bisa dilakukan baik dalam status Daerah Otonom ataupun status Wilayah Administratif. Menurut Maskun :

“Seyogyanya tuntutan untuk menjadi daerah otonom diawali terlebih dahulu dengan terbentuknya beberapa Propinsi Administratif maupun Kabupaten dan Kecamatan. Diharapkan penetapan wilayah administratif tersebut merupakan suatu proses penting untuk mendewasakan dan memperkuat kemampuan Propinsi/Kabupaten /Kecamatan tersebut agar suatu saat dapat menjadi Daerah Otonom”.

Pertimbangan ini penting mengingat banyak Daerah Otonom, baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kecamatan yang belum memiliki kemampuan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (berotonomi). Hal lain mengingat bahwa pemekaran tidak saja dapat dilihat dari sisi kemampuan keuangan daerah, tetapi juga faktor-faktor lain yang juga turut menentukan.

Pembentukan daerah otonom bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dan mensejahterahkan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dalam hal ini daerah otonom memiliki wewenang otonomi yang luas dan utuh guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tujuan pembentukan daerah otonom tidak dapat dilihat semata-mata dari dimensi administrasi dalam arti untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, tetapi juga dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya.

5. Kriteria Pemekaran Kecamatan

a. Luas Wilayah

Berkaitan dengan luas wilayah yang menjadi salah satu faktor penyebab pemekaran kecamatan disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2000 bahwa syarat minimal luas wilayah dalam sebuah pembentukan suatu kecamatan yaitu:

- a. Wilayah Jawa dan Bali minimal 7,5 km²
- b. Wilayah Sumatra dan Sulawesi minimal 10 km²
- c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya minimal 12,5 km² (Kep. Mendagri No 4 Tahun 2000)

Selanjutnya geografi dalam pengertian fisik menjadi dasar penentuan batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang relatif kecil adalah areal yang tepat untuk :

1. Pelayanan lebih optimal, karena wilayah pelayanan relatif sempit.
2. Pemerintahan lebih responsif karena lebih dekat dengan komunitas yang dilayani.
3. Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka.
4. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan masyarakat.
5. Pengawasan menjadi lebih mudah karena wilayah pengawasan yang relatif sempit (Mutalib, 1987)

Letak atau lokasi merupakan faktor penentu perkembangan suatu daerah. Oleh karena itu untuk menentukan lokasi suatu kecamatan harus didasarkan pada penelitian yang cermat dari berbagai faktor yang menunjang dan mempengaruhi keberadaan lokasi kecamatan tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Christaler dalam Nursid Sumaatmadja (1988: 125) yang menyatakan bahwa:

“tempat yang sentral diasumsikan sebagai tempat yang memberikan peluang kepada manusia yang jumlahnya maksimum untuk berpartisipasi dalam kegiatan pelayanan, baik sebagai pelayananya maupun sebagai pihak yang dilayani. Tempat semacam ini dicitrakan sebagai titik simpul-simpul dari suatu bentuk geometrik heksagonal yang memiliki kawasan pengaruh yang luas terhadap kawasan-kawasan sekitarnya”.

Selanjutnya Nursid Sumaatmadja (1988: 125) menyatakan bahwa teori tempat sentral menganalisa tempat-tempat yang dilayani kebutuhan penduduk yang lokasinya pada tempat sentral.

b. Jumlah Penduduk

Dalam pembangunan di samping faktor fisik kita juga harus memperhatikan faktor non fisik yaitu faktor penduduk merupakan faktor non fisik yang sangat mendukung dalam pembangunan suatu wilayah. Aspek kependudukan merupakan hal paling mendasar dalam pembangunan. Dalam nilai universal, penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Faktor penduduk dalam hal ini meliputi: jumlah dan kepadatan yang merupakan potensi tersendiri suatu wilayah untuk mendukung terjadinya pembangunan.

Sesuai dengan pendapat Bintarto, (1977: 73) yang menyatakan bahwa:

“perkembangan kota terutama dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk yang tinggal di suatu daerah, maka semakin besar pula potensi yang dimiliki daerah tersebut untuk melaksanakan pembangunan daerahnya”

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2000 disebutkan bahwa syarat minimal jumlah penduduk dalam sebuah pembentukan suatu kecamatan yaitu:

1. Wilayah Jawa dan Bali minimal 10.000 jiwa
2. Wilayah Sumatra dan Sulawesi minimal 7.500 jiwa
3. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya minimal 5000 jiwa.

c. Aktivitas Perekonomian

Faktor ekonomi mempunyai hubungan yang erat dengan masalah pembangunan hal ini didasarkan pada keadaan ekonomi yang meningkat diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dibidang lainya sehingga lebih mengejar pertumbuhan ekonomi sebagai indikator keberhasilan pembangunan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bintoro (Riyadi, 2003: 19) yang berpendapat bahwa:

“gejolak-gejolak ekonomis yang besar (atau gejolak-gejolak politik dll) paling sedikit kurang memungkinkan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang baik.”

Dari pendapat di atas menunjukan bahwa pada dasarnya pembangunan akan dapat berjalan dengan baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan juga pada saat evaluasinya bila ditunjang oleh kondisi ekonomi yang stabil tanpa mengabaikan stabilitas bidang lain.

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2000 dijelaskan bahwa Kemampuan ekonomi merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Propinsi, Kabupaten atau Kota. Dalam sebuah pemekaran kecamatan sarana perekonomian dapat dilihat dari:

1. Jumlah bank
2. Lembaga keuangan non bank
3. Kelompok pertokoan
4. Jumlah Pasar (Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2008)

4. Sarana dan Prasarana Pembangunan

Aspek yang sering menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan antar daerah yang mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah.

Menurut Siagian (1994), menyatakan bahwa:

“Pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).”

Selanjutnya Infrastruktur pembangunan yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah yaitu:

1. Rasio Penduduk Berdasarkan tingkat Pendidikan
2. Rasio fasilitas kesehatan per penduduk
3. Rasio sarana peribadatan per penduduk
4. Rasio fasilitas lapangan olahraga per penduduk
5. Jumlah balai pertemuan (peraturan pemerintah no 19 tahun 2008).

Hal ini sesuai dengan tujuan pemekaran daerah yaitu untuk pemeratakan pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah yang akan di mekarkan, serta membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, pemekaran daerah bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.

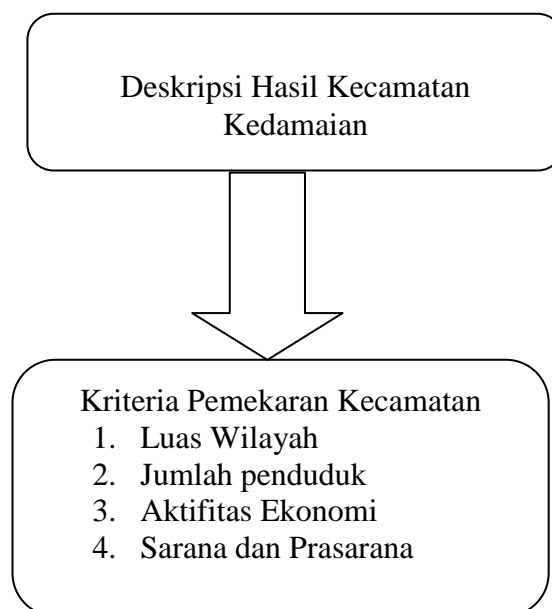
Lebih terperinci tujuan tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 yaitu :

1. Mempercepat laju pertumbuhan pembangunan
2. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya
3. Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
4. Mempertinggi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan
6. Terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

2. KERANGKA PIKIR

Dalam pemekaran suatu wilayah sangat diperlukan pertimbangan dan perencanaan pengembangan pembangunan. karena Perencanaan wilayah merupakan perencanaan penggunaan atau pemanfaatan ruang wilayah, yang pada intinya adalah perencanaan penggunaan lahan (land use planning). Pemekaran wilayah harus memperhatikan unsur-unsur geografis, karena dalam suatu pembangunan daerah terdapat faktor-faktor geografis yang akan berpengaruh terhadap perkembangan daerah yang dimekarkan tersebut.

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi suatu kecamatan untuk melakukan pemekaran wilayah yang yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 04 tahun 2012 yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, aktifitas ekonomi, dan keadaan sarana dan prasarana pembangunan.



Gambar 1. Diagram Alir Pemekaran Kecamatan Kedamaian

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif. Menurut Sukardi (2003:162), penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Adapun menurut Nazir (2003:4), Metode Deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa, pada masa sekarang.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa metode Deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai kriteria pemekaran Kecamatan Kedamaian di Kota Bandar Lampung.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang yang terdiri dari 1 Kepala Kecamatan Kedamaian, dan seluruh kepala Kelurahan di Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

C. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kajian geografi yang menyangkut luas wilayah, jumlah penduduk, aktifitas ekonomi, serta sarana dan prasarana pembangunan.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 1993:91). Yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: kriteria pemekaran wilayah Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

2. Definisi Operasional Variabel

1. Luas Wilayah

Luas wilayah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah luas wilayah Kecamatan Tanjungkarang Timur Sebelum Pemekaran pada tahun 2011 dan luas Kecamatan Kedamaian sebagai hasil pemekaran Kecamatan Tanjungkarang Timur pada tahun 2018.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dalam penelitian ini semua orang yang berdomisili di Kecamatan Kedamaian selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang menetap kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Untuk pemekaran suatu

kecamatan jumlah penduduk minimal diatur dalam peraturan daerah masing-masing kabupaten yang bersangkutan. .

3. Aktifitas Perekonomian

Dalam sebuah pemekaran kecamatan hasil aktivitas perekonomian dapat dilihat dari:

1. Jumlah bank pada Kecamatan Kedamaian
2. Lembaga keuangan non bank di Kecamatan Kedamaian
3. Kelompok pertokoan di Kecamatan Kedamaian
4. Jumlah Pasar di Kecamatan Kedamaian

4. Sarana dan Prasarana Pembangunan

Dalam penelitian ini sarana kecamatan yang dimaksud yaitu sarana pendidikan. Sarana kesehatan, sarana, ibadah, kantor kecamatan(balai pertemuan) dan sarana olahraga di kecamatan kedamaian

Pembangunan yang ada di harapkan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan yang baik dapat di lihat dari berbagai indikator seperti dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik, lebih jelas disebutkan dalam peraturan pemerintah No.19 Tahun 2008.Tentang Infrastruktur pembangunan yaitu:

1. Rasio tingkat pendidikan

2. Rasio fasilitas tenaga medis
3. Rasio sarana peribadatan per penduduk
4. Rasio fasilitas lapangan olahraga perpenduduk
5. Jumlah balai pertemuan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta dilapangan, Pohan (2007: 57). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Observasi.

Teknik pengumpulan data dengan observasi ini dengan cara pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data sekunder guna mengetahui gambaran umum Kecamatan Kedamaian dan obyek yang sedang diteliti.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut Jehoda (2008:79) observasi menjadi alat penelitian ilmiah apabila mengacu kepada tujuan dan sasaran yang dirumuskan, direncanakan secara sistematis, dicatat dan dihubungkan secara sistematis dengan proporsi-proporsi yang lebih umum, dan dapat dicek dan dikontrol ketelitiannya.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau jawaban secara langsung dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden yang akan dijawab secara jelas. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara tidak struktur. Pada teknik wawancara ini peneliti akan memberikan pertanyaan terhadap kepala kecamatan dan kepala kelurahan tentang keadaan ekonomi, sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Kedamaian dan Tanjungkarang Timur.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini digunakan peneliti dalam rangka memperoleh data. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan di peroleh data yang lengkap, sah dan bukan merupakan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada yaitu: jumlah penduduk, batas-batas kecamatan, dan peta kecamatan Kedamaian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab variabel luas wilayah kecamatan dan jumlah penduduk yang padat dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif datanya di dapat dengan metode pengamatan di lapangan, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya di analisis

kualitatif lalu dibandingkan dengan kriteria yang baku diinterpretasikan dan dapat disimpulkan dalam bentuk laporan penelitian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang deskripsi pemekaran wilayah Kecamatan Kedamaian di Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa: Kecamatan Kedamaian merupakan pemekaran dari Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung yang resmi dimekarkan pada tahun 2012. Pendeskripsian tentang Kecamatan Kedamaian yang diteliti oleh penulis meliputi:

1. Luas wilayah Kecamatan Kedamaian yang tidak sesuai kriteria teknis pemekaran kecamatan dengan ketentuan wilayah Sumatra dan Sulawesi minimal 10 km², berdasarkan data penelitian luas wilayah Kecamatan Kedamaian hanya mencapai 8,21 km² yang berarti tidak memenuhi kriteria teknis pemekaran wilayah kecamatan. .
2. Jumlah penduduk Kecamatan Kedamaian yang sesuai dengan kriteria syarat teknis pemekaran kecamatan yaitu minimal jumlah penduduk suatu kecamatan mencapai jumlah minimal dengan ketentuan wilayah Sumatra dan Sulawesi minimal 7.500 jiwa, berdasarkan data yang penulis teliti penduduk Kecamatan Kedamaian mencapai 52.593 jiwa.

3. Keadaan ekonomi kecamatan Kedamaian cukup memadai di dukung sarana transportasi darat yang menunjang yang dilalui jalan transportasi utama by pass jl soekarno hatta, masyarakat hidup dari berwiraswasta dengan jumlah mencapai 5403 atau 10,08% dari jumlah penduduk Kecamatan Kedamaian, dan sarana ekonomi yang maksimal di Kecamatan berjalan secara maksimal dikarenakan di Kecamatan Kedamaian mempunyai lembaga keuangan seperti Bank atau lembaga keuangan lainnya..
4. Sarana pembangunan di Kecamatan Kedamaian di bidang bidang sarana dan prasarana sangat mengharapkan lebih meningkatkan pembangunan fasilitas yang ada maupun yang belum ada diwilayah ini, sehingga nantinya Kecamatan Kedamaian dapat meningkatkan perekonomian dan tarap hidup masyarakatnya

B. Saran

1. Untuk pihak pemerintah Kecamatan Kedamaian agar dapat meningkatkan sarana dan prasarana serta pelayanan publik di wilayah Kecamatan Kedamaian sesuai dengan visi dan misi serta tujuan pembangunan yang ada di Kecamatan Kedamaian. Hal ini bertujuan tujuan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat agar bisa tercapai dengan maksimal.
2. Untuk Masyarakat wilayah Kecamatan Kedamaian agar dapat membantu meningkatkan pembangunan yang ada di Kecamatan Kedamaian karena kecamatan ini baru berdiri dan masih banyak kekurangan dibidang sarana pembangunan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Abe, 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*: Pondok Edukasi, Solo.
- Andi Prastowo, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*: Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Anonimus. 2017. *Monografi Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung*
- Bintarto, 1989. *Pengantar Geografi Pembangunan: P.T.P.B Kedaulatan Rakyat*, Yogyakarta.
- C.S.I.Kansil, S.H.2001. *Pemerintahan Daerah Indonesia*. Sinar Grafika Jakarta.
- Hadi Sabari Yunus. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- _____.1991. *Konsepsi Wilayah dan Prinsip Pewilayahan*. P.T. Hardana: Yogyakarta.
- _____. 1994. *Teori dan Model Struktur Keruangan Kota*. Fakultas Geografi UGM: Yogyakarta.
- Hari Kartono . 1989. *Pembangunan Wilayah dan Penggunaan Tanah Berencana Geografi*. F.MIPA UI: Jakarta.
- Haris Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*: LIPI Pres: Menteng Jakarta.
- Wijdaja HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____. 2003. *Otonomi Desa*. P.T. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Mantra, Ida Bagoes. 2000. *Demografi Umum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Josef Riwu Kaho. 1995. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Effendi Sofian, Masri Singarimbun. 1987. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Yogyakarta

- Moh. Nazir. 2003. *Metode penelitian*. Ghalia indonesia: jakarta.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga: Jakarta.
- Nursid Sumaatmadja. 1981. *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*: Alumni: Bandung.
- Riyadi. 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. P.T. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sikola Gee. 2005. Faktor Yang Paling Mendukung Pembentukan Kabupaten Nias Selatan. *Skripsi*: Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Robinson Tarigan. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sukardi. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sumadi. 2003. *Filsafat Geografi*: FKIP UNILA. Bandar Lampung.
- Tajri. 2007. Tinjauan Geografis Terhadap Pemekaran Wilayah Administratif Desa Cempaka Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara *Skripsi*: Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Riggs Fred W. 1994. *Administrasi Pembangunan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.